

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

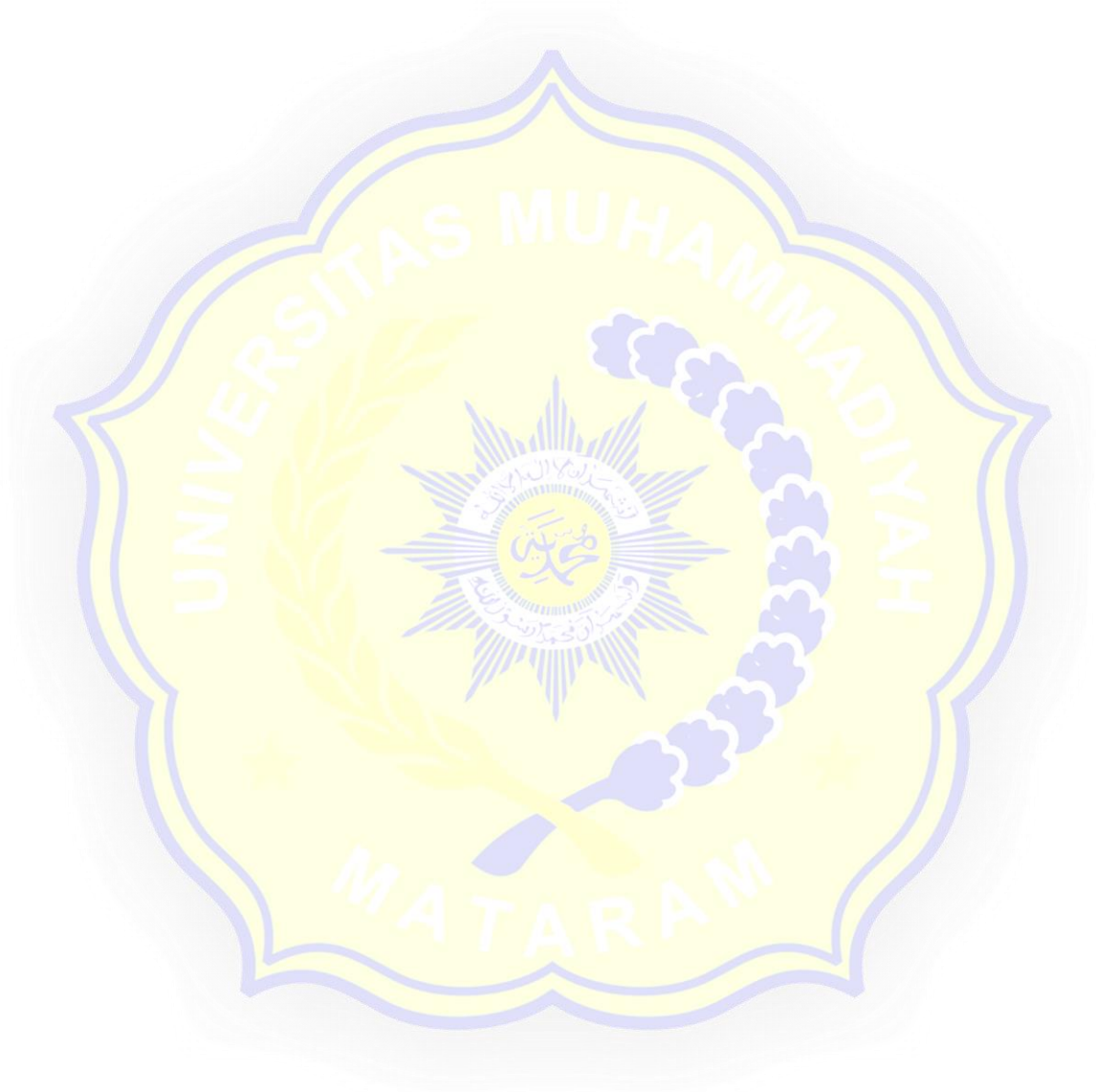
1. Landasan Yuridis alih status kepegawaian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditinjau dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memenuhi syarat dan ketentuan Perundang- Undangan dan tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia (UUD NRI Tahun 1945)
2. Prosedur Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi di atur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan praturan turunan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka penulis dapat memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi agar melakukan proses alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan turunannya.

2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera mengajukan dan menetapkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memenuhi syarat dan ketentuan praturan PerUndang - Undangan menjadi Aparatur Sipil Negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Asshiddiqi Jimly.2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,Jakarta, Raja Grafindo Persada.

C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Engeliem R. Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2*. Jakarta: Rineka Cipta.

Darmiyati Zuhdi. 2002. *Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas Tinggi*. Malang: Universitas Negeri Malang.

Dahlan Thalib, Jasim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, Fajar Interpratama, 2001

Green Mind Community. *Teori Dan Politik Hukum Tata negara*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2009

Hans Kelsen. 2018. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien dari *General Theory of Law and State* (1971). Bandung: Nusa Media

Hans Kalsen .1945, *General Theory Of Law And State*, Rusell & Russel, New York : Nusa Media

I Dewa Gede Atmaja, Suko Wiyono, Sudarsono, *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum*, Malang, Setara Press, 2015.

Ibrahim Johnny. 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang : Bayumedia Publishing

KPK. 2006 ,*Memahami untuk membasmi*. KPK Press. Jakarta

Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal Sistem: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation,

Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius

Muslim Mahmuddin. 2004, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia

Suryabrata,Sumadi,2006.*Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

B. Peraturan PerUndang - Undangan

Indonesia, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. TLN. Republik Indonesia Nomor 3886

Indonesia, Undang - Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TLN. Republik Indonesia Nomor 4250

Indonesia, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan . TLN. Republik Indonesia Nomor 5234

Indonesia, Undang - Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.TLN. Republik Indonesia Nomor 5494

Indonesia, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan . TLN. Republik Indonesia Nomor 6398

Indonesia, Undang - Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TLN. Republik Indonesia Nomor 6409

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. TLN. Republik Indonesia Nomor 181

Indonesia, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi
Pegawai Aparatur Sipil Negara. TLN. Republik Indonesia Nomor 49

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIX/2021

C. Jurnal

M. Laica Marzuki. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jurnal Konstitusi*
Volume: 7

Emil P.B. (2010). “*An Exception to the Rule? Why Indonesia’s Anti-Corruption
Commission Succeeds Where Others Don’t - a Comparison with the
Philippines’ Ombudsman.*” U4 Issue Volume: 4.

Kurnianingrum, T.S. (2019). “Revisi UU NO. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi : “*Melemahkan Kinerja KPK?*” Info Singkat XI

Lubis, E.Z., (2017), *Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal
Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration
Journal*, Volume: 7

Anggiat P. Simamora & Ramsul Nababan. *Landasan dan Dampak Hukum Test
Wawasan Kebangsaan KPK: Suatu Kajian Doktrinal Strukturasi: Jurnal
Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2) 2021: 201-208, DOI:
10.31289/strukturasi.v3i2.74

Fitria, “*Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Negara
Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”.2020

D. Website/Internet

<https://media.neliti.com/>.Pemberhentian Pegawai Kpk Sudah Sesuai Ketentuan .di
akses pada Tanggal 12 Nopember 2021. Pukul 10:30 WITA

<https://nasional.kontan.co.id>, Pemberhentian pegawai KPK di akses pada Tanggal 12 Nopember 2021. Pukul 13:37 WITA

<https://www.kpk.go.id/>, di akses pada tanggal 12 Nopember 2021 pukul 10:10 WITA

<https://nasional.tempo.com/>, Temuan Ombudsman tentang TWK KPK. Di akses pada Tanggal 12 Nopember 2021. Pukul 12:50 WITA

<https://law.uui.ac.id/>, Kedudukan Lembaga negara bantu dalam sistem. Di akses pada Tanggal 12 Nopember 2021 pukul 13:21 WITA

<https://www.kpk.go.id/>, di akses pada tanggal 12 Nopember 2021 pukul 10:10 WITA

<http://e-journal.uajy.ac.id/12062/4/MIH023383.pdf>.metode penelitian.diakses pada tanggal 20 Nopember 2021 pukul 10:29 WITA.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt60a26d0d27bbd/limacacat-hukum-twksebagai-dasar-penonaktifan-75-pegawai-kpk/>). Di akses pada tanggal 4 Desember 2021 pada pukul 13:12 WITA

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f32710c290e4/4-potensi-masalah-alih-status-pegawai-kpk-jadi-asn/> Di Akses Pada Tanggal 5 Desember 2021 Pada Pukul 17:08 WITA

<https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5f32710c290e4/4-Potensi-Masalah-Alih-Status-Pegawai-Kpk-Jadi-Asn/?Page=2> Di Akses Pada Tanggal 4 Desember 2021 Pada Pukul 13:10 WITA

<https://news.detik.com/berita/d-5560340/membedah-peraturan-kpk-soal-alih-status-pegawai-jadi-asn>. Di akses pada Tanggal 4 Desember 2021 Pada Pukul 12:32 WITA

<https://caritahu.kontan.co.id/>, Pegawai KPK di angkat menjadi ASN begini syarat dan ketentuannya. Di akses pada Tanggal 12 Nopember 2021. Pukul 12:50 WIT

